

# Implementasi BUMDES Tirta Mandiri untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok

Kevin Pradana<sup>^</sup>

## Abstrak

Desa Ponggok, merupakan salah satu daerah yang indikator keberhasilan pembangunannya dilihat dari sisi pemberdayaan masyarakat dan tingkat kesejahteraannya. Penelitian ini merupakan sebuah analisis kebijakan di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang diwujudkan dalam Peraturan Desa Ponggok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa. Menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi, dapat dilihat bahwasannya melalui pendekatan konseptual *Bottom-up* BUMDes Tirta Mandiri mampu memberikan hasil yang signifikan, namun tak luput dari hambatan-hambatan yang ada diantaranya ialah kesadaran masyarakat dan perangkat desa yang terdahulu masih terpacu untuk menguasai program dan fasilitasnya. Menggunakan Teori Grindle, penelitian ini mencoba memahami bagaimana BUMDes Tirta Mandiri mampu memperbaiki program yang ada menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Peraturan Desa, Implemenrasi kebijakan, BUMDes

## Abstact

*Ponggok, one of the village that adopts a development success index based on the welfare status and community empowerment. This research deal with the policy analysis in Ponggok village, Polanharjo Sub-district, Klaten Regency which embodied in Ponggok village Regulation No. 6/2009 on Village Owned Enterprise. Using the qualitative approach, it can be judge that the role BUMDes Tirta Mandiri has not been considerably satisfying. This due to the fact that some constraints exist, namely community awareness and the former government on village level cannot take its grip off the existing progam and facilities involving them as the main executor. Building upon Grindle perspective, this study is designed to understand how Tirta Mandiri (village-owned enterprise) can modify and better the angoing development progam.*

*Keywords: Village Regulation, Implemenasi policy, BUMDes*

---

<sup>^</sup> Mahasiswa Program Sarjana Departemen Ilmu Politik, Fisip Univesitas Airlangga Angkatan 2013 [kevinprd17@gmail.com](mailto:kevinprd17@gmail.com)

## **Pendahuluan**

Seperti kebanyakan negara berkembang di belahan dunia lainya, Indonesia merupakan salah satu negara yang mana sebagian besar penduduknya memilih hidup dan bertempat tinggal di pedesaan. Hal ini bukan dikarenakan kemiskinan dan keterbatasan yang melingkupi kehidupan masyarakat di pedesaan, melainkan tidak ada atau belum adanya usaha pembangunan yang merata sehingga masyarakat pedesaan melekat dengan karekteristik kemiskinan. Yang mana hal ini menjadikan penurunan kualitas kerja akibat pelabalan tersebut melemahkan semangat dan kemampuan masyarakat Desa.<sup>1</sup> Keadaan yang demikian, dapat kita gambarkan bahwasanya dapat dikatakan wajar jikalau masyarakat desa membutuhkan perhatian khusus melalui pembangunan yang didasari dan dimulai dari desa itu sendiri. Yang mana sebenarnya, prioritas pembangunan di pedesaan ini merupakan pembangunan berkesinambungan dengan kerangka pembangunan nasional bangsa Indonesia yang konsepnya telah diterapkan sejak awal kemerdekaan hingga saat ini.

Sejalan dengan analisis dalam penelitian ini, maka, diketahui dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan desa beserta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Indoensia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan usaha ini modalnya baik secara keseluruhan maupun sebagian dimiliki dan dikelola oleh desa itu sendiri. Melalui penyertaan secara langsung dalam produk hukum tersebut, bahwasanya segala yang berasal dari kekayaan desa atau sesuatu Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang ditujukan untuk kesejahteraan desa adalah kekayaan desa.<sup>2</sup> Sehingga, dengan dibangunnya BUMDes maka masyarakat akan dilibatkan dalam

---

<sup>1</sup> Bryant Coralie dan Louise White, 1985, Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara Berkembang, terjemahan, Jakarta, LP3ES.

<sup>2</sup> Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 1

segala kegiatan dan pengelolaan yang mana akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa.

Dalam sebuah penelitian, terdapat anggapan bahwa metode-metode yang diterapkan dalam pembangunan desa, akan tetap gagal apabila masih diikuti oleh beberapa hal sebagai berikut:<sup>3</sup> Program yang telah berjalan cenderung melambangkan bentuk dari keinginan atau rencana dari kepala desa terkait berikut pula pengurus LPM. Hal ini menjadikan kondisi dimana suatu program tidak mendapat dukungan yang signifikan dari masyarakat. Sementara dengan belum berfungsinya LPS secara maksimal menjadikan kewajiban pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa masih lemah. Hal ini dikarenakan tingkat SDM dari aparat pemerintah desa beserta pengurus lembaga kemasyarakatan di desa yang masih tidak mumpuni.

Sehingga, untuk semakin mensukseskan pencapaian tujuan dari keberadaan BUMDes Tirta Mandiri, juga perlu adanya pengawasan. Seperti yang dibahas dalam penelitian berikut:<sup>4</sup> Untuk mencapai tujuan suatu BUMDes maka diharuskan untuk memiliki suatu pengawasan. Yang mana badan ini bertujuan untuk menertibkan permasalahan yang muncul terkait dengan faktor kedisiplinan dan system pengendalian manajemen dalam organisasi yang masih tergolong lemah. BUMDes selaku lembaga ekonomi desa wajib melaksanakan fungsi di mana dalam penyelenggaraanya terdapat pengawasan internal.

Sejak terbentuk dan berdirinya BUMDes Tirta Mandiri dan beroperasi di tahun 2009, selain mampu meraup pendapatan bersih sebesar Rp.140.388.300 BUMDes Tirta mandiri juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur desa sebagai bentuk dari kemampuan desa

---

<sup>3</sup> Legi. Riedel, Rompas. W. Y, dan Pombengi. Jericho D, *Implementasi Pendekatan Bottom-Up Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan*. Hlm. 52.

<sup>4</sup> Astuti. Putri Febri , *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bumdes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*. Departemen Politik Dan Pemerintahan. Universitas Diponegoro. Hlm. 5.

dalam memanfaatkan dana desa yang ada, semisal nya dalam pembangunan kantor untuk semakin menunjang kegiatan birokrasi desa, memberi bantuan pendidikan berupa beasiswa untuk mencetak SDM yang lebih baik, dan bantuan BPJS dalam menjaga angka kelangsungan hidup tetap baik.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka pemerintah pusat harus lebih bijak lagi dalam memperhatikan permasalahan yang ada di desa. Hal ini tidak lepas untuk menunjang upaya-upaya pemberdayaan masyarakat serta perbaikan ekonomi sebagai usaha untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan yang ada di desa. Sementara itu upaya menampung usulan serta segala bentuk kegiatan ekonomi masyarakat yang melembaga dapat dikelola secara professional oleh badan usaha desa sebagai bentuk pengaplikasian sistem kerja BUMDes. Hal ini tidak lepas tujuan untuk menjadikan usaha masyarakat lebih efektif dan produktif.

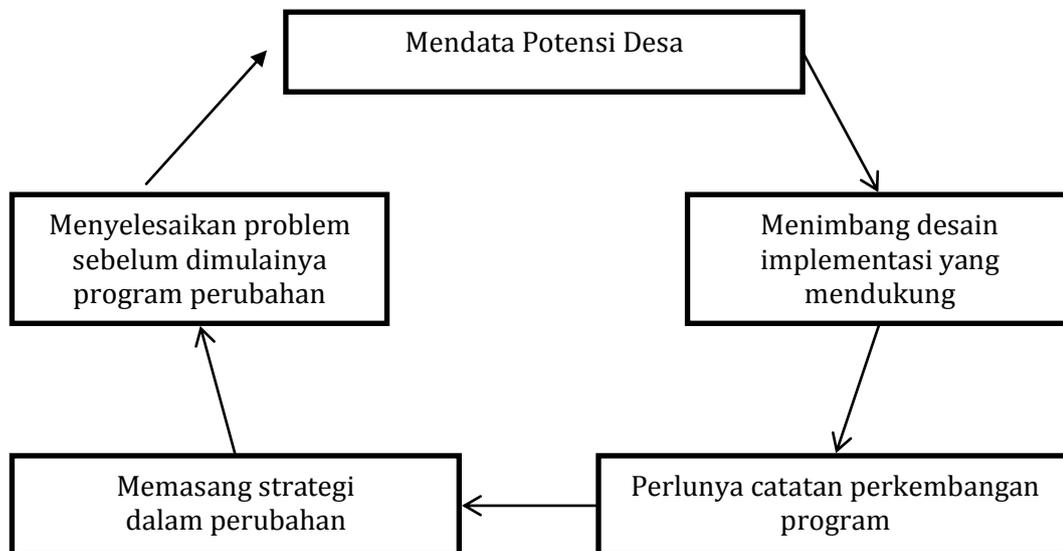
Berangkat dari pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendalami persoalan bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Desa Ponggok Nomor 6 Tahun 2009 tentang BUMDes Tirta Mandiri mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten ditinjau dari perspektif implementasi kebijakan Grindle.

### **Mencapai Kesejahteraan Melalui BUMDES Tirta Mandiri**

Dalam membangun kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa Ponggok menyadari, bahwasanya keikutsertaan (partisipasi) dari masyarakat itu sendiri selaku subyek dan obyek dari pembangunan adalah berifat fital. Yang mana hal ini menjadikan tingkat keberhasilan program tergantung pada indikator ini sebagai poin utamanya. Tercatat bahwasanya saat ini telah terdaftar kurang lebih berkisar 200 kepala keluarga (KK) yang tergabung dalam kegiatan BUMDes dari jumlah total 700 KK di ponggok. Jika ingin ditelusuri, maka kesuksesan ini dapat di lihat dari bagaimana alur

program upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok. Berikut bagan dari alur tersebut:

**Bagan 1.1 Alur Upaya Pemberdayaan Masyarakat Ponggok**



Sumber: Diolah oleh peneliti dari hasil wawancara dengan ketua BUMDES Tirta Mandiri

Dari penggambaran bagan di atas dapat kita lihat bahwasanya dalam pewujudan upaya pemberdayaan tersebut, Kepala Desa Ponggok menuturkan bahwasanya memang diharuskan akan kesadaran dari masyarakat desa untuk berubah, kemudian hal ini akan merupakan titik awal dari perlunya pembangunan masyarakat yang mandiri.<sup>5</sup> Terlebih dengan usaha masyarakat yang mau dan berani untuk melepaskan diri dari keegoisan menikmati secara pribadi fasilitas program untuk kepentingan bersama.

Lebih lanjut lagi, kemauan ini haruslah ditarik lebih dalam agar mau dan bersedia untuk ambil andil dalam kegiatan program pemberdayaan yang nantinya akan diwujudkan dalam BUMDes. Sehingga efektifitas dan efisiensi

---

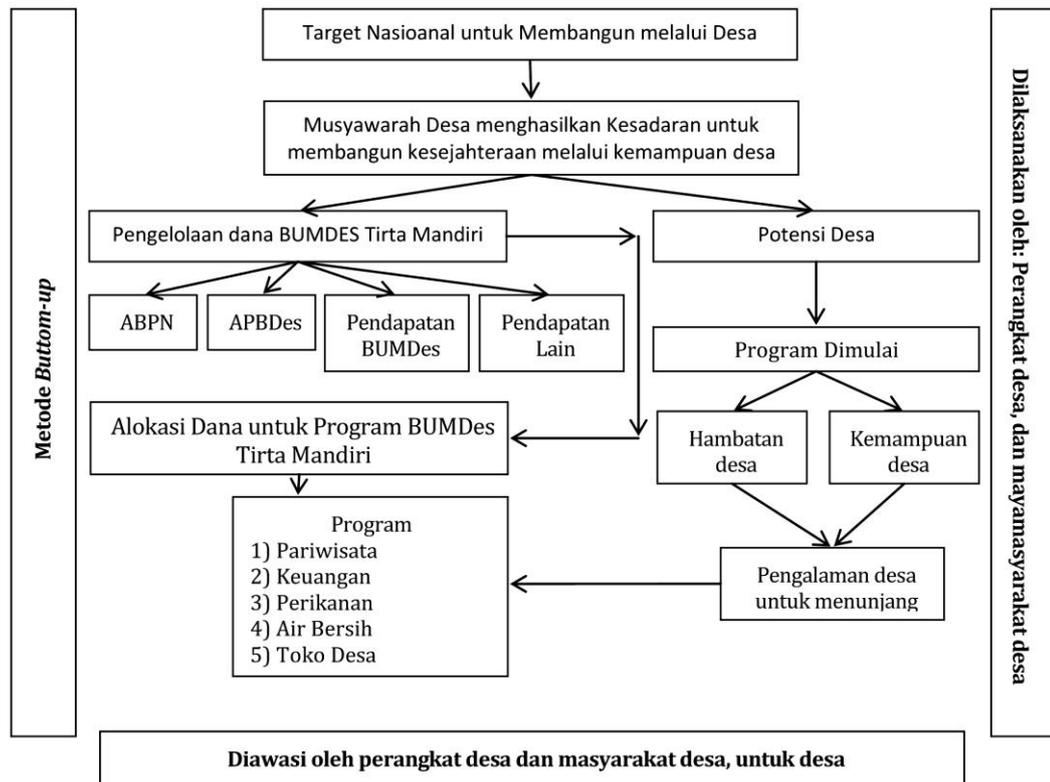
<sup>5</sup> Wawancara dilakukan kepada Juenaedhi Mulyono selaku Kepala Desa Ponggok pada 26 Agustus 2017

kegiatan pemberdayaan yang ditujukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat di capai secara signifikan.

Melihat bagaimana konsep yang nanti diterapkan oleh BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, maka kearifan lokal menjadi salah satu pertimbangan yang diambil. Hal ini diperuntukan sebagai upaya peningkatan kapasitas karyawan selalu melihat karakteristik masing-masing karyawan, dan proses pembinaan dan bimbingan khususnya pada karyawan baru melalui jenjang pelatihan yang menggunakan metode pendampingan teknis dari atasan dan rekan kerja secara kekeluargaan tanpa meninggalkan profesionalitas sistem kerja.

Hal ini dapat dibaca berdasarkan premis dari tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan. Seperti yang kita ketahui, jika ingin meningkatkan suatu keberhasilan capaian, maka haruslah penggeraknya kita lebih dahulu diperbaiki, atau kembali memberi energi. Maka secara langsung, hal ini akan menunjang keberhasilan. Berikut adalah gambaran bagaimana alur dari penerapan BUMDes Tirta Mandiri dari hulu hingga hilir. Berikut juga tahapan-tahapan sosialisasi dan musyawarah tingkat masyarakat desa dalam bentuk; Musyawarah Desa, Musyawarah Dusun, Musyawarah khusus Perempuan.

## Bagan 1.2 Mekanisme kerja BUMDes Tirta Mandiri



Sumber: Diolah oleh peneliti dari data RPJMDes Ponggok

Berdasarkan kenyataan pembangunan desa selama ini, dapat kita lihat bahwasanya terdapat hubungan kecenderungan antara dua faktor yakni individu maupun kelompok masyarakat desa dengan hubungannya dalam tingkat partisipasi pencapaian pembangunan desa, yaitu<sup>6</sup>: pertama, partisipasi yang timbul dari inisiatif diri sendiri baik secara individual maupun kelompok, dan kedua, ialah partisipasi digerakkan dan dimunculkan atas dasar keinginan dan dimobilisasi pemerintah.

Dalam menjalankan konsep *buttom-up* yang dilakukan oleh BUMDes Tirta Mandiri, usaha yang digeluti untuk meningkat kesejahteraan masyarakat diambil dari program-program yang telah ada, sebagian pula menjalankan dan mewujudkan kelebihan yang dimiliki desa berupa program

<sup>6</sup> Taliziduhu Ndraha, 1997, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta, Bina Aksara.

kerja. Diantaranya ialah, bidang pariwisata yang diwujudkan dalam bentuk program pengelolaan sumber air Umbul Ponggok untuk wisata air (Snorkling, Diving, Fotografi dan renang). Bidang keuangan dalam bentuk program Pinjaman/Kredit Usaha. Bidang persewaan dalam bentuk program Rental Kendaraan dan Gedung. Bidang Perikanan dalam bentuk program Budidaya Ikan. Bidang Air Bersih dalam program Penyediaan air bersih.

Dengan demikian, pendekatan *bottom-up* dalam setiap perencanaan pembangunan desa haruslah ditingkatkan secara terus-menerus dalam pelaksanaannya dalam tatanan era pemerintahan saat ini. Disebutkan dalam sebuah kebijakan<sup>7</sup>, bahwasanya perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa.

Dari pengamatan yang selama ini telah dilakukan, dapat kita lihat bahwasanya pembangunan desa yang dicerminkan dalam kegiatan program BUMDes Tirta Mandiri, masih memiliki kendala. Yakni diantaranya ialah, pembangunan desa masih bersifat sentralistik dan dapat dirasakan oleh masyarakat terdekat yang tergabung dalam program, berikut pula kepala desa sebagai jajaran pemerintahan yang memiliki legitimasi tertinggi seolah memiliki pengaruh paling kuat sehingga hal (program) tersebut terwujud atas permintaan dan kekuasaannya yang mana berikut serta pula pengurus LMD dan LPM didalamnya, maka wajar, jika masih didapati masyarakat yang masih tidak mendukung berjalannya program.

Dalam menjelaskan hal tersebut, maka penjelasan mengenai tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan dibahas dalam penjelasan selanjutnya.

### **Tingkat Keberhasilan Implementasi Kebijakan Perspektif Grindle**

Dalam menjelaskan peristiwa yang terjadi di Desa Ponggok dan BUMDes Tirta Mandiri yang membawa serta keberhasilan nyatanya tetap

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 63

memiliki hambatan, sehingga menarik untuk didiskusikan secara teoritis. Dalam menganalisis, penulis mencoba memfokuskan pada teori Implementasi kebijakan dalam perspektif Grindle. Menurut Grindle, hasil implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konten dan konteks kebijakan.

Desa Ponggok melalui BUMDes Tirta Mandiri terus menapaki perkembangan yang efektif. Namun dengan intervensi pemerintah yang terlalu besar mengakibatkan terhambatnya upaya pengelolaan mesin ekonomi di pedesaan dimana daya inovasi dan kreativitas juga ikut terhambat. Sehingga upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama.

Adanya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, hal ini dapat mengakibatkan matinya semangat kemandirian sekaligus menunjukkan bahwasanya sistem dan mekanisme dalam kelembagaan ekonomi masih belum berjalan efektif. Hal inilah yang menjadikan pemerintah Desa Ponggok sadar akan keharusan mereka dalam merubah pendirian dan bertumpu pada kekuatan sendiri.

Seperti halnya pada aspek potensi ekonomi yang mana berdampak pada jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes, bahwa pengelola BUMDes mengalami kesulitan ketika mengusulkan pelebaran jenis usaha pengairan. Mereka menyadari bahwa pengelolaan aspek ini memiliki hambatan yang dikarenakan pengurus dan penanggung jawab program tersebut ialah anggota internal pemerintahan desa. Namun, setelah pergantian jabatan dan didukung oleh Undang-Undang maupun peraturan desa, pada akhirnya program tersebut berada di bawah kendali BUMDes yang mana di harapkan akan mendorong pemasukan bagi desa dan juga hasil pertanian masyarakat.

Kembali pada persoalan konteks kebijakan yang diterapkan, maka kebijakan ini berpacu pada sasaran dimensi dalam penerapan kebijakan. Dimana kebijakan tersebut ditujukan demi pembangunan desa dengan

pendekatan *bottom-up* atau sering juga disebut pendekatan partisipatif. Akan lebih jelas jika pendekatan ini diartikan sebagai suatu proses penyusunan perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa bersama lembaga kemasyarakatan desa dan melibatkan berbagai unsur terkait dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Metode *bottom-up* dalam penerapan BUMDes Tirta Mandiri ini dapat terlihat dari, *pertama* adanya bentuk dari kemitraan yang didasari oleh keinginan pemerintah dan masyarakat setempat, dan mewujudkannya dalam implementasi suatu program; *kedua* tanggung jawab penuh atas program adalah dibawah tanggungan masyarakat setempat sendiri, yang menjadikan masyarakat desa semakin mandiri dalam membuat keputusan, perencanaan, implementasi, berikut juga monitoring dan evaluasi program dengan dukungan pemerintah.<sup>9</sup>

Untuk menjelaskan secara lebih rinci maka dapat kita telusuri melalui bagan berikut:

---

<sup>8</sup> Marzuki Muhammad, 2004, *Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif*, Modul PKM, Jakarta, Departemen Dalam Negeri.

<sup>9</sup> Legi, Riedel. Rompas, W. Y. Pombengi, Jericho D. *Implementasi Pendekatan Bottom-up Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan*. Diakses pada 23 Juni 2017 Pukul 23:16 di <https://media.neliti.com/media/publications/1266-ID-implementasi-pendekatan-bottom-up-dalam-perencanaan-pembangunan-desa-di-kecamatan.pdf>.

### Bagan 1.3 Implementasi BUMDes Tirta Mandiri dari Perspektif Grindle



Dari bagan diatas dapat kita lihat bahwasanya implementasi kebijakan Perdes Ponggok No 6 Tahun 2009 tentang BUMDes dapat berjalan sesuai perspektif Grindle. Namun, terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik.

^Dijelaskan dalam perspektif ilmu politik, maka implementasi kebijakan ini mendapatkan korelasi yang signifikan dengan sistem yang digunakan dalam aspek politik. Hal ini dikarenakan perspektif organisasi dalam administrasi publik mulai terbantahkan jika dianggap sebagai aspek tunggal, sehingga hal ini mulai memberikan hasil yang maksimal terhadap arena baik diluar ataupun di dalam administrasi itu sendiri.<sup>10</sup>

Sesuai dengan problematika yang sudah digambarkan sebelumnya bahwa persoalan pengelolaan menjadi problem serius pada pembangunan Desa Ponggok. Persoalan ini kemudian dijadikan pijakan untuk mengevaluasi persoalan pengelolaan berbagai sektor riil yang ada. Salah satu problem yang fundamental adalah pertanian. Corak produksi Desa Ponggok adalah pertanian, tetapi pertanian tidak mampu menjadi sektor untuk penopang ekonomi Desa. Tentu saja lembaga itu adalah BUMDes Tirta Mandiri, yang telah membuktikan fungsinya sebagai motor pembangunan ekonomi di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

Telah tercatat dalam berbagai media bahwasanya BUMDes Tirta Mandiri merupakan bukti nyata kesuksesan pembangunan desa. Hal ini diperkuat pendapatan asli Desa Ponggok yang diterima pusat yang menyatakan bahwasanya desa Ponggok memlalui BUMDes Tirta Mandiri mampu memperoleh sebesar Rp.350.000.000 di tahun 2014 lalu. Memang benar bahwasanya Desa Ponggok kini menjadi salah satu contoh nyata dari kemandirian masyarakat desa dalam mengelola daerahnya sehingga menjadikan dan mewujudkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa aspek. Dal beberapa bentuk usaha yang dikelola BUMDes Tirta Mandiri ialah diantaranya merupakan pengeloan air bersih, perikanan, pariwisata umbul ponggok, perkreditan, kios kuliner dan minimarket.

---

<sup>10</sup> Astuti. Putri Febri , *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bumdes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*. Departemen Politik Dan Pemerintahan. Universitas Diponegoro. Hlm. 5.

Telah dimengerti oleh sebagian masyarakat Indonesia, bahwasannya konsep yang diambil pemerintah dalam pembangunan nasional ialah menjadikan desa dan masyarakatnya sebagai objek sasaran sekaligus pelaku atau subyek dari proses pembangunan desa itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut menggunakan konsep bottom-up ini menjadikan pemerintah dalam posisi hanya sebatas pemerian arahan dan pengawas serta kontroling beserta pula bimbingan dan pemberi fasilitas di dalamnya. Dengan kata lain, inisiatif, prakarsa dan partisipasi masyarakat merupakan faktor paling penting dalam laju pembangunan desa.

Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri dilakukan secara baik, dana yang terkumpul masuk kedalam Kas Desa, yang kemudian dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat secara fisik maupun non fisik. Adanya berbagai unit usaha yang di kelola oleh BUMDes Tirta Mandiri memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan bekerjasama dengan BUMDes.

Strategi yang digunakan di Desa Pongok adalah komitmen pelaksana jajaran pemegang kebijakan di Kabupaten Klaten sampai dengan pelaksana di lapangan yang sangat tinggi. BUMDes Tirta Mandiri ini berhasil menyelamatkan Desa Pongok dari kemiskinan, salah satunya adalah pengurangan jumlah pengangguran.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat kita ketahui bahwasanya penerapan kebijakan BUMDes membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menyadari potensi desa yang mana hal ini mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Dengan kembali menjalankan unit usaha dan program pembaharuan melalui BUMDes akan membuka peluang kepada masyarakat dalam hal memperoleh pekerjaan, dan mengajarkan kepada masyarakat bagaimana memobilisasi

potensi yang dimiliki desa. Selain isi keberadaan BUMDes memberikan pengalaman sehingga memotivasi dan menstimulus masyarakat untuk mengembangkan segala bentuk usaha sehingga meningkatkan pendapatan perkapita.

Implementasi kebijakan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok tak terlepas dari pengambilan strategi yang menerapkan model proses politik dan administrasi dengan cara mengimplementasikan sesuai dengan isi kebijakan, jenis manfaat yang dapat dirasakan sehingga dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik untuk masyarakat desa. Bagian itu merupakan dari dimensi konteks implementasi dalam proses model politik dan administrasi yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.

### **Daftar Pustaka**

- Astuti. Putri Febri , *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bumdes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*. Departemen Politik Dan Pemerintahan. Universitas Diponegoro. Hlm. 5.
- Bryant Coralie dan Louise White, 1985, *Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara Berkembang*, terjemahan, Jakarta, LP3ES.
- Legi, Riedel. Rompas, W. Y. Pombengi, Jericho D. *Implementasi Pendekatan Bottom-up Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan*.
- MarzukiMuhammad, 2004,*Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif*, Modul PKM, Jakarta,DepartemenDalam Negeri.
- Ndraha taliziduhu, 1997, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta, Bina Aksara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 .